

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK KOTA BANJARMASIN

Erli Pardila ¹, Fakhsiannor ², Sitna Hajar Malawat ³

¹ Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NIM19120212

¹ Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NIDN1120106301

¹ Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NIDN1113059101

Email : pardilaerli17@gmail.com

Abstrak

Good Governance yaitu prinsip pendekatan yang menekankan pembangunan sektor publik melalui tata kelola pemerintahan yang efektif. Keterbukaan informasi publik dalam konteks teori hak asasi manusia dan efektivitas hukum yaitu hak yang melekat pada individu secara alamiah, memiliki dasar hukum yang kuat dalam konstitusi, diakui oleh negara-negara modern, serta mencerminkan budaya yang berkembang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), kuisisioner (angket), observasi (pengamatan) dan gabungan ketiganya. Hasil penelitian bahwa Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam keterbukaan informasi publik di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin sudah berjalan dengan baik, informasi di berikan secara transparan. Diskominfotik juga mewujudkan keterbukaan informasi publik dengan mengikuti arus perkembangan jaman dengan memanfaatkan sejumlah media sosial diantaranya Website, Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, dan aplikasi E-lapor dengan demikian informasi dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Faktor yang mempengaruhi prinsip-prinsip *Good Governance* dalam keterbukaan informasi publik di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin antara lain ada 2 yaitu : pertama faktor pendukung, kerjasama antar pegawai dan pimpinan dalam menjalankan misi yang sudah direncanakan dengan tujuan mencapai visi dari Diskominfotik. Kedua Faktor penghambat masih kurangnya Diskominfotik menjangkau masyarakat luas yang memerlukan informasi publik.

Kata Kunci : *Good Governance, Keterbukaan Informasi Publik*

Abstract

Good Governance is an approach principle that emphasizes public sector development through effective governance. Openness of public information in the context of human rights theory and legal effectiveness is a right that is inherent in individuals naturally, has a strong legal basis in the constitution, is recognized by states. modern country, and reflects a developing culture. This research uses qualitative research methods. Qualitative research is research that produces descriptive data in the form of written and spoken words from people and observable behavior. Data collection techniques can be carried out using interviews, questionnaires, observations and a combination of the three. The results of the research show that the implementation of Good Governance principles in public information disclosure at the Banjarmasin City Communication, Informatics and Statistics Department has gone well, information is provided transparently. Diskominfotik also realizes openness of public information by keeping up with current developments by utilizing a number of social media including Websites, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, and E-report applications so that information can be accessed easily by the public. Factors that influence the principles of Good Governance In the openness of public information at the Banjarmasin City Communication, Informatics and Statistics Service, there are 2, namely: first, supporting factors, cooperation between employees and leaders in carrying out planned missions with the aim of achieving the vision of Diskominfotik. The second inhibiting factor is still the lack of Diskominfotik reaching the wider community who need public information.

Keywords: Good Governance, Openness of Public Information

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogj akarta. Ar-Ruuz Media.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Nariyah, Hery. 2021. *Buku Ajar Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Cirebon. CV. Syantax Computama
- Santosa, Pandji. 2008. *Administrasi Publik : Teori dan Aplikasi Good Governance*, Bandung : Refika Aditama.
- Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.
- Sedarmayanti. 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik)*. Bandung. Refika Aditama
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 2001. *Good Governance : Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*. Jakarta. Cokroamijoyo
- United Nation Development Program, 1997. *Dokumen Prinsip-prinsip Good Governance*, Jakarta : PT. Sinar Abadi.

II. Peraturan PP

- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kota Banjarmasin. Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014. Nomor 35. Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin. Banjarmasin
- Republik Indonesia. 2008. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lembaran Negara RI tahun 2008, Nomor. 61. Sekretariat Negara RI. Jakarta

III. Jurnal

- Adhitya, Aulia Rama. Dkk. 2022. Analisis Keterbukaan Informasi Publik di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya. *Jurnal penelitian dan Pengabdian Masyarakat* . Nomor 582-583.
- Muhammad, Kurniawan. 2017. Mewujudkan *Good Governance* Di Pemerintah Kota Malang Melalui Implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol 2, Nomor 2-6.
- Putra, Rizki Arif. 2021. Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Perspektif Hukum Islam. *Jurnal ilmu syariah*, Nomor 15-16.
- Retnowati, Endang (2012). Keterbukaan Informasi Publik Dan *Good Governance*. *Jurnal Fakultas Hukum* . Nomor 56-58.
- Wismaningtyas, Tri Asih dan Kurniasih, Yuni. 2021. Analisis Ketercapaian Implementasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah kota Semarang. *Jurnal Ilmu sosial dan ilmu politik*. Vol 5 . Hal Nomor 33-42

IV. Skripsi

- Putri, Resky Ananda. 2021. Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (Studi Kasus Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik) Kabupaten Jeneponto. *Skripsi Ilmu Administrasi Publik*, No.16-20.

V. Media Online

- Jejakrekam.com. 2021. *Soal Keterbukaan Informasi Publik Di Kalsel Dan Banjarmasin Ternyata Masih Standar*. Diakses dari <https://jejakrekam.com> tanggal 31 Maret 2022 jam 06.23 WITA

TV, Kompas. 2021. *Diskominfotik Banjamasin Diminta Pastikan Seluruh SKPD Memberikan Keterbukaan Informasi Pada Media*. Diakses dari <https://www.kompas.tv.com> tanggal 1 April 2022 jam 09.45 WITA